



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022 merupakan komitmen nyata Sekretariat Daerah dalam membangun SAKIP yang baik, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Biro Pengadaan Barang/Jasa sebagai Perangkat Daerah pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memberikan gambaran perkembangan atas capaian sasaran organisasi dalam satu tahun anggaran, keberhasilan ataupun kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini, dapat menjadi media informasi serta bahan untuk mengevaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah, agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar, Februari 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA,

ASRUL SANI, S.H., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19750321 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, selain itu Laporan Kinerja juga memberikan informasi terkait keberhasilan, kegagalan, kendala, dan solusi yang dilakukan oleh suatu instansi dalam rangka mewujudkan capaian kerjanya.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yang dijalankan dengan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Singkat Organisasi

1. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta menyelenggarakan pelayanan administratif sesuai pembedaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- (1) penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- (3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan

- secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- (5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- (1) Biro Pengadaan Barang/Jasa;
- a) Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
- 1) Subbagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pendampingan, Konsultasi, Dan/Atau Bimtek Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Bagian Pengelolaan Barang/Jasa, meliputi:
- 1) Subbagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, meliputi:
- 1) Subbagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
 - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan dukungan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beberapa isu strategis yang dihadapi saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren kepada Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah

kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

3) Penataan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah yang kemudian dituangkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Besaran organisasi perangkat daerah dalam mengakomodasi urusan pemerintahan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah sehingga setiap daerah besaran organisasinya tidaklah sama. Sehingga dalam rangka efektifitas dan efisiensi perangkat daerah dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarnya.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global

yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah sangat dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah wajib membuat maklumat pelayan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis pelayanan publik yang disediakan, kemudahan akses, kejelasan prosedur, biaya serta ruang bagi masyarakat untuk memberikan pandangan terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dasar hukum baru yang mengatur tentang kepegawaian.

Secara umum pokok-pokok yang diatur dalam UU ASN adalah mengatur Jenis, kedudukan dan status ASN, Jabatan ASN, Hak dan Kewajiban, Kelembagaan, KASN, Mutasi, penggajian, pemberhentian, pengisian jabatan pimpinan tinggi, ASN yang ingin jadi pejabat negara, serta organisasi dan penyelesaian sengketa. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bebas KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat. ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan (pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan), dan tugas pembangunan tertentu (dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat).

6) Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir dan Budaya Aparatur.

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah sumber daya aparatur yang secara kuantitas dan kualitas dapat berfungsi optimal mendukung organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur (pegawai) sebanyak 84 orang yang terdiri dari 49 orang laki-laki dan 35 orang perempuan.

Tabel 1.1

**Data Pegawai pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa	84
	Jumlah	84

Adapun Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan diuraikan sebagai berikut.

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa		24	55	-	4	1	-
TOTAL			25	55	-	4	1	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan ASN di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh lulusan Sarjana S1 dan S2. Sedangkan tingkat kepangkatan dan golongan ASN serta ASN berdasarkan jabatan dan jenis kelamin pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.3

**Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN Biro Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1	1	69	13	84
TOTAL		1	1	69	13	84

Tabel 1.4

Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA	JABATAN					
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	Fungsional Pelaksana (Staf)
1	Biro Pengadaan Barang/Jasa		1	1	1	23	58
TOTAL			1	1	1	23	58

E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber daya organisasi, dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Pada bagian ini disajikan juga inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang belum ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Visi misi Gubernur Sulawesi Selatan pada perencanaan periode 2018-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 tertuang visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni, inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, “terkoneksi”, “mandiri dan sejahtera”, “sehat dan cerdas” serta “berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu:

Inovatif : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kompetitif : Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter : Spirit Pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

2. MISI

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Penjelasan dari setiap misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penjelasan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi	Inovatif dan Inklusif
2	Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	Membangun Infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir	Produktif dan Inklusif
3	Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif	Mengembangkan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah	Produktif
4	Mewujudkan kualitas Manusia yang kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Memenuhi akses Pendidikan berkualitas dan penguasaan ipteks tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan ber-kualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong	Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
		pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah	
5	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang berkelanjutan	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam	Kompetitif

Dari 5 (lima) misi Pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dijelaskan di atas, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif**.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan.

Guna mendukung Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Unit Kerja dalam menunjang pelaksanaan tatakelola Pemerintahan Sekretariat Daerah mendukung Misi Pertama yaitu **“Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif”** melalui Reformasi Birokrasi serta dalam hal mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara efektif dan efisien dan mewujudkan percepatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam kerangka pemecahan masalah serta menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah dirumuskan Bersama adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah Provinsi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan **sasaran** sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang **Pengadaan Barang/Jasa**;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Sekretariat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	1. Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barangg/Jasa 2. Tingkat Kematangan UKPBJ

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dan kebijakan dari organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

Tabel 2.3

Strategi Dan Kebijakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	1. Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barangg/Jasa 2. Tingkat Kematangan UKPBJ	Meningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa	Peningkatan Pelaksanaan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dibarengi dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai alat ukur yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan dan sasaran atau sasaran dari kegiatan utama. Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), diharapkan untuk mendapatkan informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN	INDIKATOR	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur / Jumlah Paket yang akan ditender dalam RUP (x 100 %)

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 yaitu :

Tabel 2.5

**PERJANJIAN KINERJA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barangg/Jasa	100 %
		2	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

Hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Pengukuran Kinerja mencakup antara lain :

- a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
- b) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk kategorisasi kinerja (Penentuan Posisi) yang sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Di bawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Target Dari masing-masing indikator Kinerja =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2022

Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	Kode
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	1. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		2. Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ	Level 3	Level 2	88,89%	Tinggi

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran Kinerja yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN						KRITERIA CAPAIAN
			≤50	50.1 ≤ 65	65.1 ≤ 75	65.1 ≤ 75	75.1 ≤ 90	90≥	
2	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	2						94,4%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian								94,4	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 1 (lima) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut hampir seluruhnya memenuhi target capaian, terdapat 3 indikator melampaui target. Namun, masih ada indikator yang belum bisa ditentukan hasil/realisasinya pada tahun 2022 dikarenakan untuk penilaian indikator tersebut belum dilaksanakan oleh tim jadi masih hasil penilaian tahun 2021.

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada masing-masing indikator sasaran strategis berada pada level **Sangat Tinggi**.

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan per indikator sasaran.

- **Sasaran Strategis 2**

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA CAPAIAN
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	1. Tingkat penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
	2. Tingkat Kematangan/ Maturitas UKPBJ	Level 3	Level 2	88,88%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian				94,4	Sangat Tinggi

Sasaran strategis 2 seperti pada tabel didukung oleh program dan kegiatan yang ada pada Biro Pengadaan Barang/Jasa yang diuraikan sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan tabel 3.4 di atas dapat diuraikan beberapa hal berikut :

- Pada indikator Kinerja 1 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang/Jasa yaitu Tingkat penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur dengan target **100%**, realisasinya dapat dilihat melalui hasil perhitungan berikut.

**Jumlah Paket RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur /
Jumlah Paket yang akan ditender dalam RUP x 100 %
(208 paket/seleksi / 208 paket/seleksi) x 100 % = 100%**

Persentase capaiannya yaitu :

100 % / 100 % x 100 % = 100 %

- Pengukuran level kematangan/maturitas PBJ. Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa. Penetapan Indikator Level Kematangan/Maturitas UKPBJ didasari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019 – 2020 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 pimpinan K/L yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kantor Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020 dimana salah satu aksinya adalah Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa yang salah satu ukuran keberhasilannya adalah dilaksanakannya Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 (empat) domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi kedalam 9 (sembilan) variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Pada indikator Kinerja 2 yaitu Tingkat Kematangan/Maturitas UKPBJ sesuai dengan penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), realisasinya adalah berada pada **Level 3**.
(8 variabel tingkat kematangan level 3 / 9 variabel tingkat kematangan level 3) x 100 % = 100 %

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022. Program-program tersebut

dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa. Berikut Uraian program pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1) Biro Pengadaan Barang/Jasa;

- a) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa;
- b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Hingga akhir tahun 2022, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara bertahap telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya
berdasarkan tujuan strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi di bidang Perekonomian dan Pembangunan serta Pengadaan Barang/Jasa	1. Tingkat Penyelesaian pengadaan dalam RUP yang diproses melalui UKPBJ sesuai prosedur	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Tingkat Kematangan /Maturitas UKPBJ	Level 2	Level 3	Level 2	88,8 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dari realisasi kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Ada pula indikator yang realisasinya masih mengacu pada realisasi tahun 2021 dikarenakan belum adanya hasil capaian/penilaian untuk tahun 2022 seperti hasil penilaian LPPD, nilai SAKIP Provinsi dan Perangkat daerah serta rata-rata indeks reformasi birokrasi.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi kinerja tahun 2022 sudah tertuang dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET RENSTRA (%)					Realisasi Tahun 2022
				I	II	III	IV	V	
1	Optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah provinsi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatkan Tata Kelola dan dan Kualitas Perumusan Kebijakan penyelenggaraan administrasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	1. Persentase Paket Tender/ Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barang/Jasa	100	100	100	100	100	100 %
			2. Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 2

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi untuk setiap sasaran strategis di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai target tahun pertama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 4.663.710.404 dengan realisasi sebesar Rp 4.402.685.835 atau 94,40 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,6%.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI	
			Rp	%
1	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.663.710.404	4.402.685.835	94,40
JUMLAH		4.663.710.404	4.402.685.835	94,40

Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja TA 2022

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

- 1) Tujuan dan Sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat tercapai melalui pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menuangkan program mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD serta mampu meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan Adapun capaian program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

Tabel 3.8
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Biro Pengadaan Barang/Jasa			
1	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	% Kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan rencana		
		% Kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa		
		% Capaian Kinerja Pembinaan Usaha Jasa Pembangunan		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diinventarisir	14000	14000
		Jumlah Laporan Hasil Riset dan Analisis Pasar	2	2
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi strategi Pengadaan Barang /Jasa	6	6
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen RPP yang difasilitasi Penyusunannya	208	208
		Jumlah Paket Tender yang diproses melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa	208	208
		Jumlah Produk yang dikelola dalam Katalog Lokal	1650	1650

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	12	12
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Jumlah Belanja Pengadaan yang dilaksanakan Secara Elektronik		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan LPSE OPD dan Kab/Kota	4	4
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	2	2
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah	3	3
		Jumlah hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang pengembangan sistem informasi/aplikasi	9	9
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12	12
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Kontrak	12	12
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan lembaga Pemerintah atau Non Pemerintah	3	3
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sumber Daya Manusia yang dibina	168	168
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ	4	4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
		Jumlah Laporan Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKPBJ 24 Kab/kota	4	4
	Pendampingan Konsultasi dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi	1	1
		Jumlah Peserta Bimtek/Workshop Pengadaan Barang/Jasa	66	66
		Jumlah Fasilitasi Layanan Pendampingan	3	3
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	3	3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik yang disediakan	5	5
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18	18

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	1170	1170
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	3	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang terbayarkan Pajaknya	15	15
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang dipelihara	15	15
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	15	15

F. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta pencapaian target rencana kinerja juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran dimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp.4.663.710.404,00** Realisasi Anggaran sebesar **Rp.4.402.685.835,00** dengan persentase **94,40%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 261.024.569,00**.

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9

**Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Unit Kerja
Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI CAPAIAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa	1. Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barang/Jasa 2. Tingkat Kematangan UKPBJ	4.663.710.404,00	4.402.685.835,00	90,54 %

Analisis Efisiensi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi Biro Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI%
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa	1. Persentase Paket Tender/Seleksi yang diproses di Biro Pengadaan Barang/Jasa 2. Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %	94,40 %	5,6%

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2018-2023. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan untuk target yang tercapai namun belum secara maksimal pada tahun ini perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Hasil Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Analisis sasaran strategis perangkat daerah secara keseluruhan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa seluruh realisasi sasaran strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa telah mencapai target yaitu sebesar 100 % dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu Sangat Tinggi.
2. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 4.402.685.835,00** atau persentase **94,40 %**.
3. Secara keseluruhan, pencapaian target pada tahun 2022 tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang bisa menghambat peningkatan kinerja seperti Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki dan keterbatasan dukungan anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan strategis di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap triwulan.
2. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel, mempunyai integritas dan inovatif
3. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Lingkup Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara terus menerus.

Makassar, Januari 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA,

ASRUL SANI, S.H., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19750321 200312 1 008